

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang di dambakan. Pembangunan yang dilakukan di setiap negara maupun daerah dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata sehingga keberhasilan pembangunan dapat tercapai. Keberhasilan pembangunan tidak saja dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi, namun harus dibarengi dengan tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, setiap daerah akan memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan melihat sejauh mana tingkat pemerataan pembangunan yang terjadi di wilayahnya.

Menurut Meier (Gemmel; 1994) pembangunan adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah negara dapat meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah orang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik dan distribusi pendapatan semakin tidak timpang.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk

Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk membentuk lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan.

Ketimpangan di berbagai daerah merupakan fenomena dan isu yang kompleks bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena hal ini dihadapkan pada permasalahan bagaimana menurunkan dan mengurangi ketimpangan di negara berpenduduk ± 260 juta orang.

Ketimpangan pendapatan adalah sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi masyarakat merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan. Masalah ketimpangan pendapatan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Jika pemerintah tidak aktif melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan perekonomian akan diatur oleh mekanisme pasar yang akibatnya dapat memberikan dampak negatif bagi pembangunan selanjutnya yaitu melebarnya jurang kesejahteraan dari masa ke masa antara daerah kaya dengan daerah miskin.

Menurut Adelman dan Morris (1973) secara umum yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, inflasi yang dikarenakan pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, capital intensif sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi impor yang berakibat pada peningkatan harga barang hasil industri, memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dengan negara maju, dan hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, dan lain-lain (Arsyad, 2004).

Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem

sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Basri, 1995).

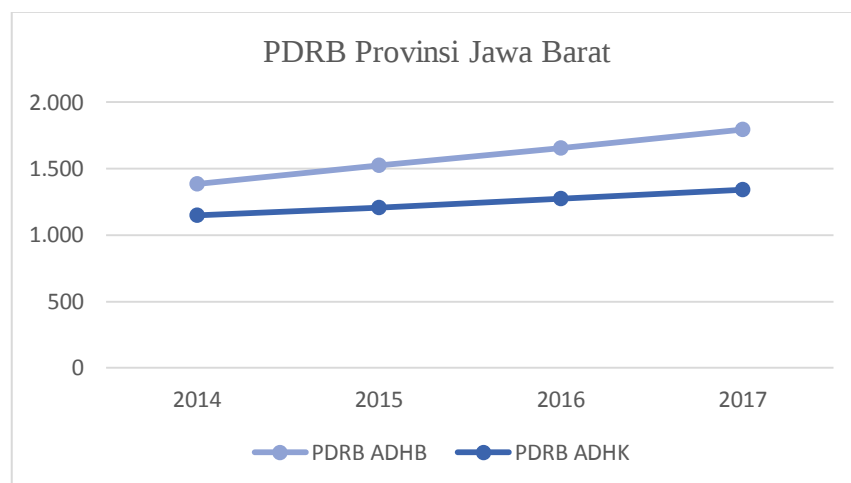
Upaya untuk memperkecil ketimpangan pendapatan antar masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi yang lebih banyak yang mengarah pada proyek-proyek yang ada hubungannya dengan masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan pertanian dan sebagainya sehingga ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar. Keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan ekonomi melebihi laju pertumbuhan penduduk, belum merupakan suatu tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu merata atau tidaknya tingkat kemiskinan. Tetapi keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan yang tinggi hanya melambangkan tolok ukur kemajuan ekonomi secara kuantitatif saja (Sagir, 2002 : 20).

Ketimpangan pembangunan pada prinsipnya merupakan ketimpangan ekonomi yang mengandung makna kesenjangan dan kemiskinan. Agar perkembangan antar suatu daerah dengan daerah lain tidak menimbulkan jurang yang semakin lebar, maka implikasi kebijakan terhadap daur perkembangan dari pembangunan haruslah dirumuskan secara tepat.

Permasalahan ketimpangan juga dirasakan oleh salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, tercatat penduduk provinsi Jawa Barat adalah 48.683.700 jiwa. Dengan adanya berbagai karakteristik yang berbeda menyebabkan adanya tingkat kesenjangan yang terjadi, salah satunya yaitu kesenjangan pendapatan.

Oleh karena itu ketimpangan pendapatan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari selama masih ada perbedaan kemampuan dan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut. Yang dapat menjadi perhatian disini adalah usaha untuk mengurangi ketimpangan yang terlalu besar melalui pengelolaan faktor-faktor dan sumber daerah secara optimal. Dengan demikian akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik disertai dengan pemerataan pendapatan yang baik pula.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator yang mempunyai peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dengan keberhasilan pembangunan daerah.

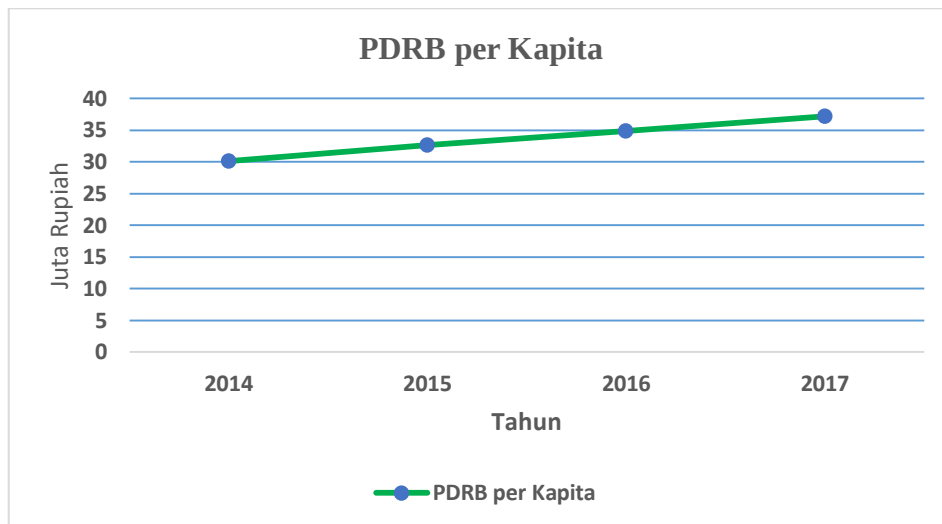


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1
PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017

Menjaga stabilitas ekonomi menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagaimanapun tumbuhnya

ekonomi Jawa Barat berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada tahun 2017.

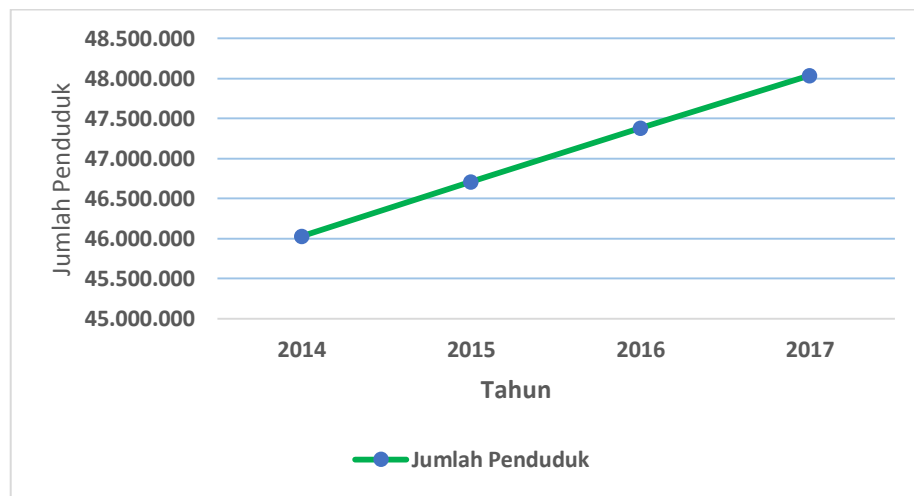


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.2
PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat 2014-2017 (Juta Rupiah)

PDRB per Kapita merangkak naik dari Rp. 30,11 juta pada 2014 menjadi Rp. 37,18 juta pada tahun 2017 jika dihitung atas dasar harga berlaku. Pendapatan perkapita cenderung selalu meningkat.

Populasi penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau untuk dibayar dibawah standar. Hal ini berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan adalah peningkatan populasi penduduk.

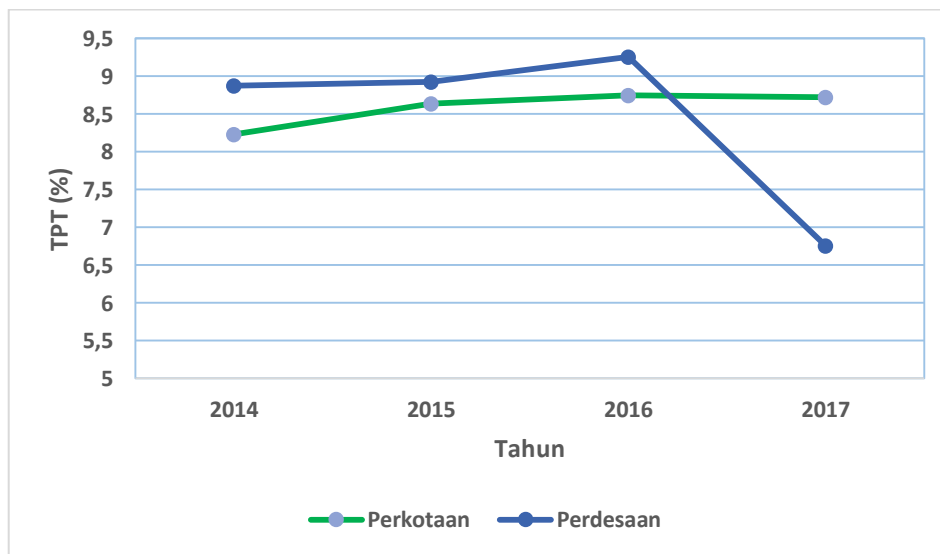


Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat 2014-2017

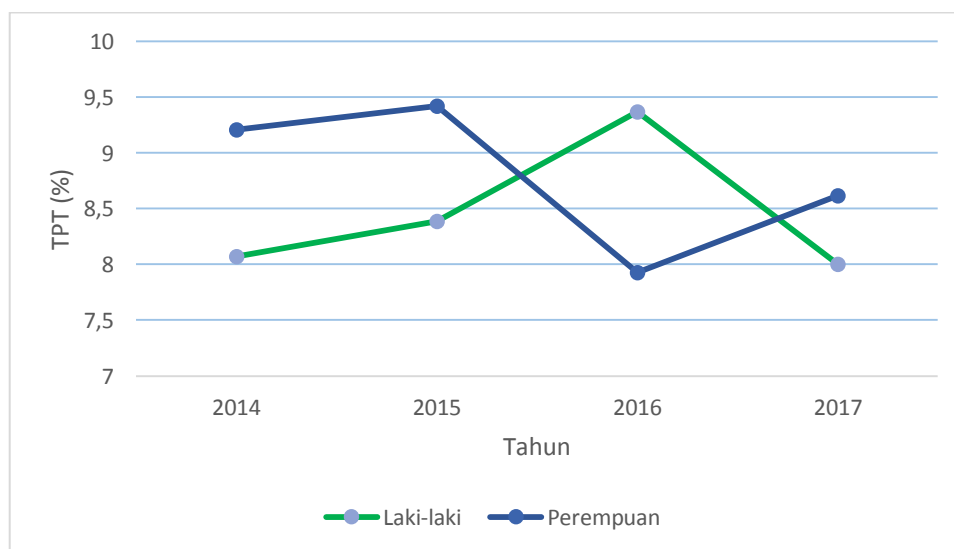
Ketimpangan pendapatan akan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 1.3 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahunnya. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan, terutama bagi mereka penduduk yang miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Tentu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dimana salah satu nya adalah mendorong para pencari kerja untuk menjalankan usaha mandiri dengan menggelar berbagai pelatihan kerja mandiri. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pengangguran diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Menurut Daerah 2014-2017



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2017

Dilihat dari Gambar 1.4, TPT di perdesaan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Dan dari Gambar 1.5 dapat dilihat jika TPT

perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, kecuali pada tahun 2016 TPT perempuan lebih rendah dibanding TPT laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun demikian, selama 4 tahun terakhir, gap antara TPT perempuan dan TPT laki-laki semakin kecil.

Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat khususnya di Indonesia pada umumnya. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah karena adanya perubahan struktur umur penduduk usia kerja, tingkat pendidikan, distribusi tenaga menurut lapangan pekerjaan dan sebagainya. Sementara itu dilihat dari sisi ketersediaan tenaga kerja masih bervariasi sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai.

Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun keterampilan sumber daya manusia, sehingga lebih memudahkan sumber daya manusia tersebut dalam mencari pekerjaan karena mempunyai nilai daya saing yang tinggi dan berakibat pada berkurangnya tingkat pengangguran yang ada.

Keterbatasan pendidikan menyebabkan pendudukan berpendidikan rendah sulit untuk mampu bersaing di pasar kerja. Dan jika dilihat dari Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SD secara umum angka TPT nya lebih rendah. Hal ini terjadi dimungkinkan pada kelompok ini cenderung berada pada tingkat ekonomi bawah.

Oleh karena itu pemerintah daerah dapat memberikan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan keahliannya. Pemberian bantuan usaha merupakan salah satu upaya agar mereka dapat membuka lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri bahkan untuk orang lain guna mengurangi tingkat pengangguran.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Menurut Pendidikan 2014-2017

Tingkat	Tahun			
Pendidikan	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< SD	4,48	4,91	5,87	4,30
SMP	12,08	10,87	10,52	4,30
SMA	13,70	12,21	11,40	10,03
SMK	15,18	16,80	16,51	16,8
Diploma I/II/III	6,18	7,59	8,26	9,51
Universitas	4,19	5,38	4,63	5,50

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Dari banyaknya permasalahan ketimpangan yang ada di Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2017”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka identifikasi masalah yang dapat di ambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana secara parsial (masing-masing) pengaruh PDRB per Kapita (PDRB_Kap), Jumlah Penduduk (JP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana secara simultan (bersama-sama) pengaruh PDRB per Kapita (PDRB_Kap), Jumlah Penduduk (JP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian, yaitu :

- 1 Mengetahui secara parsial (masing-masing) pengaruh PDRB per Kapita (PDRB_Kap), Jumlah Penduduk (JP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
- 2 Mengetahui secara simultan (bersama-sama) pengaruh PDRB per Kapita (PDRB_Kap), Jumlah Penduduk (JP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris, khususnya mengenai masalah determinan (faktor yang mempengaruhi) ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi referensi dan pembanding dalam menetapkan suatu strategi untuk pertimbangan dan solusi dalam rangka menanggulangi masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Akademis

Dapat menambah kelengkapan studi empiris dan menjadikan masukan ataupun acuan bagi penelitian lain yang hendak melaksanakan studi dari pematik yang sama.

4. Bagi Pembaca

Dapat menjadi bahan informasi dan salah satu literasi mengenai analisis yang dilakukan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jawa Barat melalui pengambilan data dari website Badan Pusat Statistik yang menyajikan data valid mengenai data statistik dan penerbitan indikator perekonomian di Indonesia.

